

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui bank BTN KCP Pangkalan Bun yang dilihat dari penyelenggaraan sesuai dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 7/PERMEN/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas memiliki rumah subsidi di Perumahan Griya Riwut Permai 1, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan subsidi KPR-RSH yang disediakan perbankan karena tidak memiliki penghasilan tetap. Berdasarkan informasi di lapangan, masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp 4.500.000 per bulan tidak di acc oleh Bank BTN KCP Pangkalan Bun.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditunjang oleh suatu variabel-variabel penentu keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Diantaranya adalah isi kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan penyaluran KPR subsidi melalui Bank BTN KCP Pangkalan Bun telah sesuai yaitu mencakup tentang kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yaitu Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR), jenis manfaat yang akan dihasilkan untuk memberikan rumah tinggal yang layak dengan harga yang murah, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program oleh Pemda yang mewakili PUPR, Bank BTN dan developer serta sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih aktif mendukung program pembiayaan KPR subsidi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara meningkatkan koordinasi dengan bank penyalur KPR subsidi dan memberikan insentif bagi bank yang bersedia terlibat aktif dalam penyaluran KPR subsidi sebagai upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Bagi bank penyalur KPR (BTN) diharapkan kedepannya lebih mengoptimalkan peran bank sebagai bank penyalur KPR subsidi agar penyaluran pembiayaan KPR subsidi lebih efektif, dan meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan sosialisasi produk-produk BTN khususnya program KPR subsidi ini kepada masyarakat baik melalui media masa, elektronik maupun dilakukan secara langsung, agar masyarakat

berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni dengan bantuan subsidi dari pemerintah.

3. Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam kebijakan ini. Agar kebijakan ini berjalan dengan baik maka, untuk faktor pendorong yakni komunikasi dalam kebijakan penyelenggaraan KPR subsidi sudah baik dan perlunya dijalin selalu hubungan komunikasi antar Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT. Griya Srikandi Permai, serta komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) terhadap masyarakat lebih dijalin lagi agar masyarakat juga paham tentang kebijakan penyelenggaraan KPR subsidi. Faktor penghambat yang menyangkut tentang sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi juga perlu diperbaiki lagi. Terkait sumber daya perlunya penambahan personil sumber daya manusia untuk membantu implementasi kebijakan penyelenggaraan KPR subsidi, karena pada saat ini sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang jumlahnya. Serta sumber daya anggaran yang juga penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan KPR subsidi ditetapkan khusus untuk kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta
- Budihardjo, E., 1992, Sejumlah Masalah Permukiman Kota, Alumni, Bandung
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc
- Innayah. Nurul Asma. 2007. “Tipologi Kredit Mikro Perumahan di kota Semarang”. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ KPTS/ 1986, Tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersistem, Departemen Pekerjaan Umum, 1986
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada
- Nazir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Panudju, B, 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta masyarakat Berpenghasilan Rendah, Penerbit Alumni. Bandung
- Parsons, Wayne. 2006. Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Permenpera No.03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi

- Riant Nugroho, 2009, Public Policy (edisi revisi), Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Solihin Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta
- Subarsono. AG. 2011. Analisis Kebijakan Public: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Varma, SP. 2007. Teori Politik Modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med. Press (Anggota IKAPI)
- Yudohusodo, Siswono et al. 1991. Rumah untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri

www.bi.go.id